

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RAMADHAN FEBRIAN

11527103033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H / 2021 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RAMADHAN FEBRIAN

11527103033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Riau”** yang ditulis oleh:

Nama : RAMADHAN FEBRIAN

NIM : 11527103033

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH., MH.
NIK. 130 217 038

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU"* yang ditulis oleh :

Nama : **RAMADHAN FEBRIAN**

NIM : 11527103033

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Di Munaqasahkan Pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris

Desi Devika Devra, M. Si

Penguji I

Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Penguji II

Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





ABSTRAK

Didalam proses tahapan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk periode 2019-2024, terjadi deklarasi dukungan untuk salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Arya Duta, Kota Pekanbaru. Deklarasi tersebut dihadiri serentak 10 (sepuluh) kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Permasalahan yang mendasar bukanlah mengenai individu dari pada Kepala Daerah, melainkan terbawa-bawanya embel-embel atribut kedinasan mereka, yang mana mencantumkan Nama dan Posisi Jabatan mereka di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Nota Pernyataan Dukungan yang ditandatangani 10 Oktober 2018. Tentu ini telah bertentangan dengan Sistem Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak hanya pelanggaran oleh Kepala Daerah saja, namun juga terlihat lemahnya fungsi pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keterlibatan kepala daerah di Provinsi Riau dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada KPU Kota Pekanbaru dan Bawaslu dalam penegakan Hukum terhadap keterlibatan kepala daerah di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan sosiologis yang mana bertumpu kepada sumber hukum sekunder, yaitu melakukan wawancara kepada pihak KPU Kota Pekanbaru dan Bawaslu yang memberikan penjelasan-penjelasan yang menjadi informasi mengenai permasalahan yang diteliti dan hukum primer yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keikutsertaan Kepala Daerah di Provinsi Riau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikarenakan terjadinya pelanggaran Administrasi pada Kepala Daerah yang terlibat pada Kampanye. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (7) bahwa Surat Cuti harus diserahkan kepada KPU 3 Hari sebelum pelaksanaan kampanye, namun pada kenyataannya berbenturan dengan aturan yang ada, bahwa KPU menerima Surat Cuti dari Kepala Daerah dihari bersamaan dengan kegiatan kampanye dilaksanakan. Sebagai lembaga yang mengatur Administrasi yang berkaitan dengan Pemilu, termasuk kegiatan Kampanye, KPU Kota Pekanbaru mengabaikan kelalaiannya dengan tidak menghadirkan Bukti pelanggaran Administrasi tersebut pada Sidang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, dan Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga pengawasan tidak menjalankan tugas pokoknya dengan tidak adanya upaya tegas terhadap Kepala Daerah dan Panitia penyelenggara yang tidak menaati Sistem Pemilu yang sudah diatur dalam aturan pelaksanaan penyelenggaraan kampanye.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat besertakan salam kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan, kesulitan, kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, arahan dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Yoserizal, S.H dan Ibunda Eliya Roza, yang telah mencurahkan kasih sayang serta do'a yang tak pernah putus serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademiki Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
5. Bapak Muslim S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
6. Bapak Nur Hidayat, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat, motivasi serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
8. Keluarga Besar yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis, serta keluarga besar di perantauan yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Rekan seperjuangan Ilmu Hukum terkhusus Ilmu Hukum F angkatan 2015 yang turut berjuang bersama untuk menyelesaikan masa perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berjuta terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, motivasi, saran beserta waktu, bukan maksud hati tidak mencantumkan nama kawan-kawan yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis

RAMADHAN FEBRIAN

NIM. 11527103033



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Provinsi Riau	18
B. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	25
C. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau	34
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Lembaga Negara dan Pembagian Kekuasaan.....	46
B. Hukum Pemerintahan Daerah	57
C. Teori Sistem Pemilihan Umum	69
 BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	
A. Keterlibatan Kepala Daerah dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Provinsi Riau	77
B. Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau terhadap Keterlibatan Kepala Daerah di Provinsi Riau Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden	82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan subjek hukum, dalam arti (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Didalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Undang-Undang Dasar merupakan dasar aturan main politik yang mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan Negara.²

Demokrasi adalah segala sesuatu yang bermula dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat (*Democratie*) Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan.³ Dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat turut berpartisipasi aktif dalam kebijakan pemerintahan demi terwujudnya Negara yang demokrasi. Indonesia menjadikan pemilu sebagai salah satu bentuk perwujudan kedaulatan masyarakat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis.

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010), h. 40.

³ Jimly Asshiddiqi, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2010), h. 59.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Demokrasi disalurkan dengan adanya pemilu secara jujur dan adil agar terjadinya *checks and balances* antara poros-poros kekuasaan, dan adanya kekuasaan kehakiman yang harus mengawal secara hukum bagi setiap perbuatan pemerintah dan rakyat yang mengancam integrasi atau mengancam tatanan dan aturan main.⁴

Pandangan Pemilu (Pemilihan Umum) secara konseptual adalah sebagai suatu instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁵

Menurut undang-undang tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pelaksanaan pemilu sangat erat kaitannya dengan kampanye. Secara umum, kampanye dapat diartikan sebagai sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, yang mana wakil terpilih diputuskan. Kampanye politik merupakan tindakan politik yang berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

⁴ Mahfud MD, *Loc. cit.*

⁵ Ibnu Tricahyono, "*Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*", (Malang: In Trans Publishing, 2009), h. 6.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Undang-Undang Pemilihan Umum menjelaskan, Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.⁷

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Makna dari bertanggung jawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku.⁸

Kampanye menurut kamus Bahasa Indonesia adalah (1) gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya); (2) kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.⁹ Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (35).

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 267.

⁹ <https://kbbi.web.id/kampanye>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 05.00

pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.¹⁰

Ahli Komunikasi Grossberg (1998), Snyder (2002) beserta Klingemann & Rommele (2002) mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Hal ini didasarkan kepada dua alasan.

1. Definisi yang dinyatakan oleh Rogers dan Storey secara tegas menyatakan bahwa kampanye adalah wujud dari tindakan sebuah komunikasi;
2. Definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan.

Definisi Rogers dan Storey juga umumnya dirujuk oleh berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu politik dan kesehatan masyarakat. Beberapa definisi lain yang sejalan dengan batasan yang disampaikan Rogers dan Storey diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Pfau dan Parrot

“A campaigns is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for the purpose of influencing a specified audience” (Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan);

¹⁰ Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 7.

¹¹ *Ibid*, hal. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Leslie B. Snyder

“A communication campaigns is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal” (Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu);

3. Rajasundarman

“A campaigns is a coordinated use of different methods of communication aimed at focusing attention on a particular problem and its solution over a period of time” (Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya).

Merujuk pada beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye setidaknya mengandung empat hal, yaitu (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) jumlah khalayak sasaran yang besar, (3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terstruktur dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu dan Kampanye pada hakikatnya adalah tindakan komunikasi yang bersifat *goal oriented*. Pada kegiatannya,

Kampanye selalu ada tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan tersebut tentu saja membutuhkan suatu aturan/ tindakan secara sistematis dan strategis.

Praktik manajemen kampanye dalam kegiatan kampanye bukanlah hal baru. Sejak awal, kegiatan kampanye selalu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan dimasukkannya unsur manajerial dalam pengelolaan kampanye, diharapkan peluang keberhasilan dan pencapaian tujuan kampanye menjadi lebih terbuka dan lebih besar.

Menurut Gregory aspek-aspek perencanaan kampanye yakni analisis masalah, penyusunan tujuan, identifikasi dan segmentasi sasaran, menentukan pesan, menentukan strategi dan taktik, alokasi waktu dan sumber daya, dan evaluasi serta tinjauan.¹²

Banyak fenomena yang berkembang terkait dengan kampanye pemilu. Dapat dilihat dari beberapa pemberitaan media massa dan media sosial pada masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2019-2024, dimana adanya keterlibatan kepala daerah dalam kampanye politik pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, salah satunya adalah terlibatnya 10 kepala daerah di Riau.¹³ Sepuluh kepala daerah ini membawa status jabatannya pada deklarasi dukungan dan juga melakukan penandatanganan pernyataan dukungan yang juga menggunakan status jabatan pada surat pernyataan dukungan mereka. Adapun 10 kepala daerah tersebut yaitu Bupati Siak/Gubernur Terpilih

¹² *Ibid*, h. 145.

¹³ <https://news.okezone.com/read/2018/11/03/605/1972885/bawaslu-putuskan-9-kepala-daerah-di-Riau-yang-deklarasi-dukung-jokowi-tak-bersalah>. Diakses pada tanggal 1 oktober 2019 pukul 22.00.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Syamsuar), Bupati Pelalawan (M.Harris), Bupati Kampar (alm Aziz Zaenal), Bupati Bengkalis (Amril Mukminin), Bupati Indragiri Hilir (M.Wardan), Bupati Kuantan Singingi (Mursini), Bupati Kepulauan Meranti (Irwan Nasir), Bupati Rokan Hilir (Suyatno), Wali Kota Pekanbaru (Firdaus) dan Wali Kota Dumai (Zulkifli).¹⁴ Sepuluh kepala daerah yang menyatakan dukungan ini mendapat surat teguran secara Administrasi dari Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dengan Nomor registrasi 700/9719/OTDA.¹⁵

Kepala Daerah pada dasarnya merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Negara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kepala daerah. Sebagai unsur utama sumber daya manusia kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Keterlibatan sepuluh kepala daerah di Riau ini tentunya melanggar aturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa, Kepala Daerah harus bersikap netral dan tidak menetapkan keberpihakan dikarenakan dampaknya yang begitu besar bagi kontestasi politik. Larangan terhadap pemerintah tersebut yaitu membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/12/28/07315851/mendagri-minta-Gubernur-Riau-tegur-10-kepala-daerah-yang-deklarasi-dukung>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 22.30.

¹⁵ <https://mediaindonesia.com/read/detail/185495-sembilan-kepala-daerah-dan-Gubernur-Riau-dukung-jokowi-maruf>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 21.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dan lebih ditekankan lagi oleh Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 yakni: *Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan (a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan (c) Gubernur, deputy Gubernur senior, dan deputy Gubernur Bank Indonesia (d) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah (e) pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural (f) aparatur sipil Negara (g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (h) kepala desa (i) perangkat desa (j) anggota badan permusyawaratan desa; dan (k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*¹⁷

Namun di aturan yang lain Kepala Daerah diberi izin untuk melakukan kampanye dengan catatan Kepala Daerah harus dalam masa Cuti dan tidak dibenarkan untuk menggunakan fasilitas dalam jabatan seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 281 ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁸ Bagi kepala daerah yang tetap melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 76.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertera pada Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan keterlibatan 10 Kepala Daerah dalam kampanye dan menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah nyata dilarang oleh Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tentu ini memperlihatkan kurangnya implementasi Undang-Undang tersebut dalam jajaran Kepala Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum sosiologis dengan judul “Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau”.

B. Batasan Masalah

Demi tercapainya penelitian yang terarah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan, penulis membuat suatu batasan masalah yang akan menjadikan penelitian lebih terarah dalam pendalaman pembahasan nantinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini penulis hanya membahas Keterlibatan Sepuluh Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Bagaimana analisis terhadap keterlibatan Sepuluh Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Provinsi Riau?
2. Apa Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas keterlibatan Sepuluh Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, di Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keterlibatan Sepuluh Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa hambatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas keterlibatan Sepuluh Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, di Provinsi Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademik, bagi perkembangan studi dalam Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hukum Tata Negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Merupakan Jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, Penelitian hukum sosiologis aatau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.²⁰

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti.²¹

Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Hukum Sosiologis (*Conseptual Approach*). Pendekatan ini ialah pendekatan yang bertumpu kepada sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai penjelasan-penjelasan yang menjadi informasi mengenai konsep dari yang diteliti.²²

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²³ Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti.²⁴

Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.²⁵ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yakni pemilihan sekelompok objek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui

²¹ Zainuddin Ali, "Metodelogi Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 105.

²² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Pranada Media Grup, 2010), h. 94-95.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Merode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 43.

²⁴ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 122.

²⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 4, h. 43.

sebelumnya. Dalam *purposive sampling* ciri yang ditetapkan adalah kelompok.²⁶ Atau lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap mengetahui tentang keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di provinsi riau. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	KPU Kota Pekanbaru	5	2	40%
2	Bawaslu Provinsi Pekanbaru	5	2	40%
Jumlah		10	4	40%

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Data Primer yang dimaksud disini adalah wawancara terhadap informan atau pihak-pihak

²⁶ Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004), h. 122.

²⁷ Zainudin Ali, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan dari lokasi penelitian yaitu Bawaslu di Provinsi Riau dan KPU di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁸ Data sekunder tersebut terbagi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pilpres.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara:

²⁸ *Ibid*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya Jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumen-dokumen dapat berupa catatan maupun data-data yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguat penelitian.²⁹

6. Analisa Data

Guna menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data seperti tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif yaitu upaya yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.³⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 4.

³⁰ *Ibid*, h. 248.

Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan kedalam lima (5) bab, yang masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antar bab satu dengan bab yang lain saling memiliki keterkaitan. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu-persatu bab tersebut.

- BAB I** Pendahuluan bab yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan umum akan menguraikan mengenai lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Riau, tugas pokok Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
- BAB III** Tinjauan teoritis ini akan menguraikan teori-teori yang melandasi permasalahan yang mengenai pelaksanaan undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

pemilihan umum, undang-undang pemerintahan daerah dan teori system pemilihan umum kepala daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat pemaparan dan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan adanya keterlibatan Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Riau.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

1. Sejarah Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 Tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).³¹

a. Periode 5 Maret 1958 - 6 Januari 1960

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 Tahun 1957, daerah swatantra tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II, yaitu : Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 Tahun 1956 (L. Negara Tahun 1956 No.25) dan Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1956.

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera

³¹ Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014, h. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, pemerintah daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Di Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung Pinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.³²

b. Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka badan penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia penyelidikan penetapan ibukota daerah swatantra tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa perang Riau daratan

³² *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.³³

c. Periode 6 Januari 1960 - 15 Nopember 1966

Dengan dilantiknnya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur pemerintahan daerah tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan penasehat Gubernur kepala daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmiah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 Tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari : (1) Wan Ghalib, (2) Soeman Hs dan (3) A. Muin Sadjoko.

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) merupakan pembantu-pembantu Gubernur kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerja pemerintah daerah, yang dititik beratkan pada :

³³ Ibid, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat;
- 2) Menggali sumber-sumber penghasilan daerah;
- 3) Menyempurnakan aparatur.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipik Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan pemerintah daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur kepala daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang wakil Gubernur kepala daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh pemerintah daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 Tahun 1962 dibentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan 1 (satu) buah Kotamadya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
- 2) Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas.
- 3) Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer.
- 4) Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf.
- 5) Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim.
- 6) Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris.³⁴

d. Pasca Reformasi

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi” telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota.³⁵ Kabupaten-kabupaten tersebut adalah :

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel / Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Kuantan Singingi	15	229	327.316	5.202.16
2	Indragiri Hulu	14	194	441.789	7.767.26
3	Indragiri Hilir	20	236	740.598	13.798.37
4	Pelalawan	12	118	483.622	12.404.14

³⁴ *Ibid*, h. 13.

³⁵ *Ibid*, h. 14.

5	Siak	14	131	489.996	8.233.57
6	Kampar	21	250	871.117	10.928.20
7	Rokan Hulu	16	145	692.120	7.229.78
8	Bengkalis	11	155	573.003	12.044.23
9	Rokan Hilir	18	198	714.497	8.961.43
10	Pekanbaru	15	83	1.143.359	633.01
11	Dumai	7	33	308.812	1.727.38
12	Meranti	9	96	206.116	3.707.84

mber : Data BPS Propinsi Riau 2020

2. Kondisi Geografis dan Demografi

Propinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas $\pm 8.915.016$ Ha (89.150 Km^2), keberadaanya membentang dari lereng bukit barisan sampai selat Malaka terletak antara $01^{\circ} 05' 00''$ Lintang Selatan $02^{\circ} 25' 00''$ Lintang Utara atau antara $100^{\circ} 00' - 105^{\circ} 05' 00''$ Bujur Timur. Didaratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung seperti sungai siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.³⁶

Adapun batas-batas Propinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara tetangga dan propinsi lainnya adalah sebagai berikut:

³⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Hasil sensus penduduk Propinsi Riau pada bulan mei 2010. Jumlah penduduk Propinsi Riau menurut hasil olah cepat sebesar 5.543.031 jiwa, sedangkan penduduk laki- laki 2.854.989 jiwa dan perempuan 2.688.042 jiwa.³⁷

3. Klimatologi dan Topografi

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1000-3000mm perTahun yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Selanjutnya menurut catatan stasiun meteorology suhu udara nya antara 21,0⁰-36,0⁰ Celcius.

Propinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 % (datar) seluas 1.157.006 Hektar, kemiringan lahan 15-40% (curam) seluas 737.966 Hektar dan daerah yang memiliki topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (>40%) seluas 550.928 (termasuk propinsi kepulauan Riau) hektar dengan ketinggian rata-rata 10 Meter di atas permukaan laut. Secara umum topografi Propinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dan agak bergelombang dengan

³⁷ Ibid,

ketenggian pada beberapa kota yang terdapat di Propinsi Riau antara 2-91 Meter di atas permukaan laut.³⁸

B. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Menurut KBBI, pemilu adalah adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya). Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan berNegara, yaitu dengan jalan memilihwakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³⁹

Pemilihan Umum dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy);
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin;

³⁸ *Ibid*, h.15.

³⁹ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁴⁰

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia;
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia);
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.⁴¹

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi,

⁴⁰ Prihatmoko, J. Joko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP21, 2003), h. 19.

⁴¹ <https://www.ruangguru.co.id/pemilu-pengertian-fungsi-tujuan-asas-bentuk-dan-sistemnya-terlengkap/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 03.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sekarang sudah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad-hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.⁴²

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah instansi yang bergerak di bidang politik. KPU berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat lebih berkualitas, dan mampu menyalurkan aspirasi rakyat.

KPU kota Pekanbaru adalah kantor bersama yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KONI, dan KPU di Sekretariat oleh H.Zubir, S.Ag yang di bantu oleh beberapa Kasubag untuk membantunya melaksanakan tugas seperti Kasubag Umum & Logistik, Kasubag Program & Data, Kasubag Hukum, Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas.⁴³

2. Visi dan Misi KPU Kota Pekanbaru

Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum#Latar_belakang. Diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 01.30

⁴³ Hasil Observasi penulis di KPU Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-undang terbaru yang mengatur tentang Pemilihan Umum sudah menjelaskan tupoksi dari lembaga Komisi Pemilihan Umum yang termuat didalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20, dan juga Badan Pengawas Pemilu yang termuat didalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, KPU Provinsi mempunyai tugas dalam setiap tahapan Pemilu yaitu:⁴⁴

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan

wewenang KPU Provinsi, sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan kewajiban KPU, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17.

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota maupun kepalasub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.



Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru periode 2019-2024

C. Badan Pengawas Pemilu

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas Pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU.

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri.

Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat.

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad-hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten Kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU.

Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* (JR), yang dilakukan Bawaslu atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat Kabupaten Kota telah berubah statusnya dari Ad-hoc menjadi permanen.⁴⁷

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga Negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁴⁸

Menurut Morissan, Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan Negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.⁴⁹

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-Negara yang menamakan diri sebagai Negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat

⁴⁷ <https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%20adanya,kekuatan%20rezim%20penguasa%20sejak%201971.&text=Setelah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang%20kelembagaan%20pengawas%20pemilu.> Diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 04.00

⁴⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 15.

⁴⁹ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdina Prakasa. 2005), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.

Pemilu juga adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasive.

1. Sejarah Bawaslu Provinsi Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang biasa disingkat dengan Bawaslu Provinsi Riau merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu ditingkat Provinsi yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu di Wilayah Provinsi Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi dipimpin oleh tiga orang Anggota Bawaslu Provinsi dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Pemilu di Wilayah Provinsi. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, dibentuk Sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang merupakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Provinsi Riau mempunyai jajaran ditingkat Kabupaten/Kota sebanyak 12 (dua belas) Panwaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dan tingkat Kecamatan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga).

Panwaslu Kecamatan yang juga terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, serta Pengawas Pemilu Lapangan yang berada ditingkat Desa sebanyak 3.567 (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) orang PPL yang tersebar di 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) desa di Provinsi Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajarannya memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajarannya lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau lahir setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 Undang-Undang ini, secara tegas menyatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Pada Pasal 73 ayat (4) huruf d memberi kewenangan kepada Bawaslu Republik Indonesia dalam membentuk Bawaslu Provinsi. Secara kelembagaan Bawaslu Provinsi bukan lagi sebagai bagian dari KPU dan juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu Provinsi merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Bawaslu Provinsi Riau merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Riau. Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan Pemilu, dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2012. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang terdiri atas 3 Sub bagian, yaitu (1) Sub bagian Administrasi, (2) Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan (3) Sub bagian Hukum, Humas dan Hubungan antar lembaga.

Anggota Bawaslu Provinsi Riau terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau, dan secara resmi dilantik pada tanggal 21 September 2012 di Jakarta.

2. Visi dan Misi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau

Langsung atau tidak langsung, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu berupa pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa merupakan upaya kontinu dan konsistensi Bawaslu dalam berkontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dari:

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi :

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

3. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau

Tugas Bawaslu Provinsi Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵⁰

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu Provinsi berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁵¹

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

⁵¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Provinsi Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang

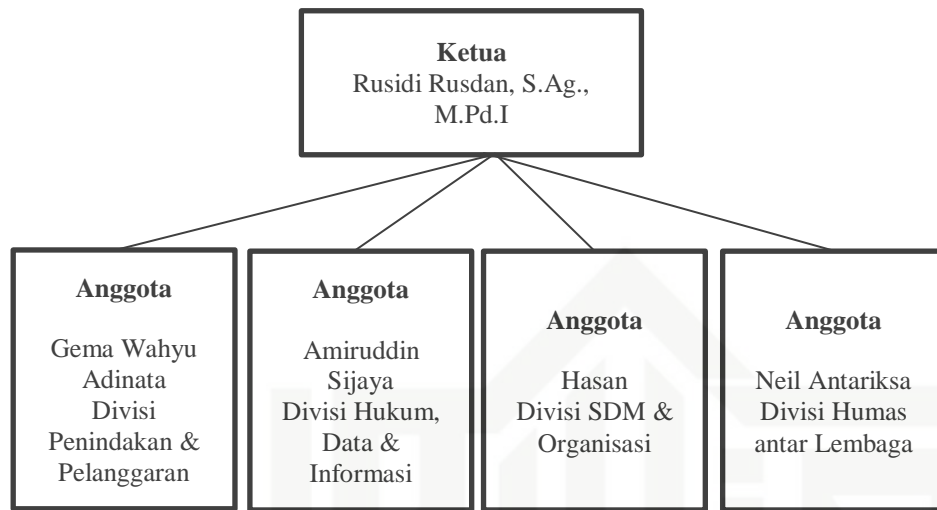
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁵²

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Bawaslu Provinsi Riau periode 2019-2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI LEMBAGA NEGARA DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

1. Lembaga Negara

Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Lembaga Daerah adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat mengundang peraturan daerah.⁵³

Secara umum Lembaga diartikan sesuatu yang mengandung nilai-nilai, norma-norma, adat dan unsur kemasyarakatan yang di anut oleh masyarakat yang sama.

Lembaga adalah proses yang terstruktur, yang dipakai orang yang menyelenggarakan kegiatannya. Lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.⁵⁴

Lembaga Negara adalah Lembaga Pemerintahan atau "Civilized Organization" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh Negara, dari Negara, dan untuk Negara, dimana bertujuan untuk membangun Negara itu sendiri.

Sebagai istilah, dalam UUD 1945 sekarang tidak akan ditemukan satu patah katapun sebutan "Lembaga Negara", namun dalam UUD 1945 ditemukan istilah "Penyelenggara Negara".

⁵³ <https://kbbi.web.id/lembaga>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 01.30

⁵⁴ <https://slideplayer.info/slide/2338863/> Diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 1.50

Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga Pemerintahan, Lembaga Pemerintahan non-departemen, atau Lembaga Negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Negara adalah sebuah organisasi berbentuk Lembaga Pemerintahan (Civilized Organization), yang dibuat oleh Negara dan bertujuan untuk membangun Negara itu sendiri. Lembaga Negara secara umum terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Pada prinsipnya, tugas umum lembaga Negara antara lain:

- a. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya;
- b. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
- c. Menjadi badan penghubung antara Negara dan rakyatnya;
- d. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat;
- e. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme;
- f. Membantu menjalankan roda pemerintahan Negara.⁵⁵

⁵⁵ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lembaga Negara merupakan Lembaga Pemerintahan Negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan, mengenal 6 (enam) lembaga tinggi/tertinggi Negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi Negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara. Namun setelah perubahan, Lembaga Negara berdasarkan ketentuan UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah Lembaga Tinggi atau Lembaga Tertinggi Negara.⁵⁶

Konsep tentang Lembaga Negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia itu identik dengan Lembaga Negara, Badan Negara, atau disebut juga dengan Organ Negara.

Lembaga-lembaga Negara yang ada dalam UUD 1945 tampaknya perumus UUD NRI Tahun 1945 dalam BPUPKI dan PPKI sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sejenis yang ada dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Belanda. Kecuali MPR, lembaga-lembaga Negara lain dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dibandingkan dengan lembaga-lembaga di Negeri Belanda, yaitu Kepala Negara (Ratu), Kepala Pemerintahan Eksekutif (Perdana Menteri), *Staten Generaal* (Parlemen) *Rekenkamer* (Pemeriksaan Keuangan), *Raad van State* (Dewan Pertimbangan Negara), dan *Hogerechtshof* (Mahkamah Agung).⁵⁷

Berbicara Susunan Organisasi Negara (Horizontal & Vertikal) berarti bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara

⁵⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 124.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.⁵⁸

Hubungan kekuasaan Lembaga Negara Horizontal adalah hubungan antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau hubungan yang saling berkait antara Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Dan hubungan kekuasaan Lembaga Negara Vertikal adalah Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah seperti hubungan antara Presiden dengan Menteri, Gubernur, Bupati dan seterusnya.

Lembaga Daerah secara garis besar termasuk dalam Lembaga Negara, karena lembaga apa saja yang terbentuk bukan sebagai lembaga masyarakat (Organisasi Non-Pemerintahan) itu dapat disebut sebagai Lembaga Negara. Secara umum juga Lembaga Daerah itu adalah DPRD, DPP, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai Negara Kesatuan, kekuasaan pemerintahan daerah berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya mendapatkan kekuasaan sisa (residu) dari pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam berbagai urusan, yang terdiri atas urusan *pemerintahan absolut* (urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat), urusan *pemerintahan konkuren* (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota) dan urusan *pemerintahan umum* (Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada

⁵⁸ Fajlurrahman Jurdi, Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial), *Amanna Gappa*, 25(2), 38-59, h. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).⁵⁹

2. Pembagian Kekuasaan

Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu Negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu Negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.⁶⁰

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga Negara lebih terjamin.⁶¹

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut,

⁵⁹ *Ibid.*, h. 55.

⁶⁰ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 152.

⁶¹ *Ibid.*, h. 281-282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yakni kekuasaan membuat Undang-Undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadakan persoalan-persoalan antara individu-individu”.⁶²

Negara sebagai suatu organisasi memiliki alat perlengkapan untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan Negara. Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden BPK, MA dan MK Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan Negara masing-masing.

Berdasarkan ajaran Trias Politica, pembagian kekuasaan Negara menjadi 3 (tiga) yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

- a. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga lembaga ini sudah diuraikan di muka.
- b. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden.
- c. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan

⁶² *Ibid*, h. 283.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Yudikatif di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA dan MK.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). Berdasarkan UUD Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan Negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga Negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan Negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan Negara, yaitu;⁶³

- 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam

⁶³ <http://pkn-ips.blogspot.com/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-Negara-di.html>. Diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 02.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- 5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. Pembagian Kekuasaan secara Vertikal

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Negara Indonesia berlangsung antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada Pemerintahan Daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya Asas Desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.⁶⁴

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, system hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan halhal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asn daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modem, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.⁶⁵ Otonomi daerah dengan paradigma pemahaman otonomi sebagai kemandirian daerah untuk menentukan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005), h. 37.

nasib dan urusan rumah tangganya sendiri, dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh Pancasila sebagai dasar Negara.

B. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah Provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi.

Daerah Kabupaten/Kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.⁶⁶

Soeroso dalam Syarifin menyatakan “yang amat penting segera diselenggarakan ialah pemerintahan daerah, karena pemerintahan daerah adalah

⁶⁶ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 2002), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendi negara kesatuan. Sendi ini harus baik dan sentosa agar negara kesatuan mempunyai pemerintahan yang stabil. Daerah-daerah menunjukkan keinginannya untuk mendapat otonomi yang teratur baik, harus dengan segera otonomi itu agar daerah-daerah dapat merasakan bahwa daerah-daerah itu dalam ketatanegaraan tidak mengalami kemunduran”.⁶⁷

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan.⁶⁸

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.⁶⁹

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif

⁶⁷ Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 18-19..

⁶⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2.

⁶⁹ <http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 11.54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.⁷⁰

Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan bentuk lebih kurang delapan tahapan hingga terbentuk pemerintahan daerah seperti sekarang. Lebih dari setengah abad pembagian tahapan pemerintahan yang berdasar pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara umum. Setiap fase pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang.⁷¹

Pada fase sekarang ini, berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tentunya penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.⁷²

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), h. 101.

⁷¹ Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, Op. Cit. h. 5.

⁷² *Ibid*, h. 17.

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Desentralisasi

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah sub-ordinat terhadap pemerintah pusat.⁷³ Hubungan sub-ordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung di urus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakan
- 2) Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi yaitu dengan diberikan kesempatan dalam kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan oleh daerah otonom (*swatantra*).⁷⁴

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif maupun administratif. Dalam ensiklopedi ditemukan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, tetapi jangan dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi. Karna dekonsentrasi adalah pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan tindakan atas nama atasannya tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya.⁷⁵

b. Dekonsentrasi

⁷³ Suharizal & Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 55.

⁷⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 86.

⁷⁵ Sarundajang, Op, Cit. h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah, kepada wilayah, instansi vertical tingkat atas kepada pejabat daerah. Menurut beberapa ahli dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain, sementara itu pandangan lain mengatakan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.⁷⁶

Jadi konsep dasar diadakan sistem Dekonsentrasi, karena tidak mungkin semua urusan pemerintah itu dapat diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Desentralisasi. Urusan pemerintahan yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Desentralisasi itu dilaksanakan melalui sistem Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

c. Tugas Pembantuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pembantuan berasal dari kata “*bantu*” yang berarti “*tolong*”, pembantuan yang berarti proses atau cara perbuatan membantu. Sementara itu menurut Tjahya Supriatna mengatakan Dekonsentrasi adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasannya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada menugasannya.⁷⁷

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa, dari pemerintah

⁷⁶ Suharizal & Muslim Chaniago, Op. Cit, h. 62.

⁷⁷ *Ibid*, h. 65-67.

Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

3. Pengertian Kepala Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan kepala daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia, sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Sedangkan pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.⁷⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

⁷⁸ W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubernur (kepala daerah provinsi), Bupati (kepala daerah kabupaten), atau Walikota (kepala daerah kota).

Pemerintah Negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara Negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*), kedua, pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan Negara yang sering juga lembaga-lembaga Negara. Secara tradisional dikenal tiga lembaga Negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Daerah

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenang. Demi berjalannya tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah diantaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD.

Paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tertuang pada Pasal 65, kepala daerah memiliki tugas dan wewenang:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara.⁷⁹

Dalam melaksanakan tugas, kepala daerah memiliki beberapa kewenangan. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang sudah termuat diatas, kepala daerah berwenang:⁸⁰

- a. Mengajukan rancangan perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban, diantaranya:⁸¹

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

⁷⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013), h. 99.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (2).

⁸¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

5. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NKRI terbagi dalam beberapa provinsi, yang mana provinsi tersebut terdapat beberapa Kabupaten dan Kota didalamnya. Daerah Kabupaten dan Kota berkedudukan sebagai daerah otonom, yang mana menurut Undangn-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸²

Pemahaman kedudukan Kepala Daerah berkaitan dengan pemahaman terhadap pengertian daerah. Istilah daerah digunakan untuk menunjuk pada wilayah yang terdapat pada Negara Kesatuan, sedangkan Negara bagian merupakan pada Negara Federasi. Perkembangan sejarah perundang-undangan pemerintah daerah di Indonesia kadang kala kepala daerah “wilayah administratif” juga dirangkap oleh kepala daerah.⁸³ Kedudukan kepala daerah dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam Negara kesatuan, yang

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), h. 23.

⁸³ *Ibid.*, h. 74.

diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi.⁸⁴

6. Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengikuti Kampanye

Terlibatnya kepala daerah sebagai anggota tim kampanye dan diizinkan mempromosikan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang mereka dukung akan mencederai demokrasi. Sistem pemilihan dengan suara terbanyak ini mensyaratkan Asas Keadilan bagi para kandidat dan pemilih.

Menjadi anggota tim kampanye salah satu kandidat membuat para Kepala Daerah menjadi tidak imparsial, tak independen, bahkan lebih dekat pada penyelewengan jabatan. Jika seorang Kepala Daerah menjadi anggota tim-pun tetap mengganggu tugas pengabdian para kepala daerah itu kepada Negara. Setidaknya mereka harus cuti, berhenti menjadi pelayan masyarakat, ketika berkampanye untuk calon presiden yang didukungnya.

Berkampanye memang menjadi hak politik tiap orang. Hanya, hak ini menimbulkan mudarat jika digunakan kepala daerah karena mereka harus meninggalkan kewajiban melayani masyarakat. Potensi penyalahgunaan wewenang lain dari kelonggaran ini adalah tiap calon presiden inkumben akan memakainya sebagai alat politik untuk menekan dan menakut-nakuti kepala daerah. Sadar akan keistimewaan akses para kepala daerah yang tak terbatas itu,

⁸⁴ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 80.

siapa pun calon inkumben akan menekan kepala daerah agar menyokongnya. Tawar-menawarnya bisa berupa kasus pidana yang mungkin menjratnya karena presiden berkuasa atas kepolisian dan kejaksaan atau tawaran jabatan bagi mereka yang pensiun setelah pemilihan usai.

Paragraf keempat mengatur mengenai larangan bagi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:⁸⁵

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang di pimpin;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk Gubernur dan wakil Gubernur serta tanpa izin Gubernur untuk Bupati dan wakil Bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

C. TEORI SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76.

Sistem Pemilihan Umum merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan Pemilu, karena sistem Pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga Sistem Pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan.

Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Sebenarnya tidak ada Sistem Pemilu ideal yang cocok di Negara manapun, tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi Sistem Pemilu agar Pemilu sendiri mempunyai Legitimasi dan Demokratis.

Pasca reformasi bergulir pada Tahun 1999, Sistem Pemilihan Umum mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan era Orde Baru. Sebagai salah satu bentuk "*purifikasi*" dari sistem presidensial, amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan perubahan Sistem Pemilu Presiden (pilpres) dari tidak langsung menjadi langsung. Dalam Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya yang menjadikan wakil rakyat di Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai penentu siapa Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin negeri ini. Pilpres langsung mulai dijalankan pada Tahun 2004, dan telah dilaksanakan sebanyak empat kali hingga hari ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa alasan yang sangat mendasar dilakukannya pemilihan secara langsung, yaitu:⁸⁶

1. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (*volontegenerate*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.
2. Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan.
3. Pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (*political party representation*).
4. Pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan

⁸⁶ Saldi Isra, "Pemilihan Presiden Lansung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi* 2, No 1 (2009): 108-109

mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat

Pelaksanaan Pemilu 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rancangan Undang-Undang Pemilu ini disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 juli 2017 dinihari dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017.

Jika dibandingkan dengan kerangka hukum untuk Pemilu-Pemilu sebelumnya, maka jelas ada yang berbeda pada Pemilu 2019, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi landasannya telah mencakup substansi dari tiga Undang-Undang. Pada Pemilu sebelumnya, substansinya terpisah-pisah dalam beberapa Undang-Undang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membaca dan memahaminya, baik masyarakat umum maupun bagi penyelenggara, pengawas, pemantau dan penegak hukum. Karena diatur secara terpisah, maka tidak jarang terdapat berbagai kontradiksi antara beberapa undang-undang.

Dengan disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang penyelenggara Pemilu ke dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisir pertentangan antar norma.⁸⁷

Kombinasi antara sistem pemilihan Presiden langsung dan skema Pemilu serentak diasumsikan dapat membawa perubahan baik bagi desain pemilu dan kehidupan berpolitik secara lebih luas. Pemilihan langsung, yang menempatkan rakyat sebagai penentu keterpilihan capres dan cawapres dalam Pemilu, dapat menjadi solusi atas proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang cenderung elitis, tertutup dan transaksional dalam lingkaran internal Partai Politik (parpol). Sementara itu, dilaksanakannya Pilpres sebagai bagian dalam skema pemilu serentak dapat menjadikan Pemilu tak hanya lebih sederhana dan murah, tetapi juga dinilai dapat menciptakan koalisi yang tak pragmatis dan berbasis ideologi atau kesamaan cita-cita politik. Hal ini berlangsung dengan asumsi, koalisi dibangun berdasar pada keinginan mengusung kandidat terbaik, bukan tergantung pada peta kekuatan politik hasil pileg seperti pada pilpres sebelumnya.⁸⁸

Tentang sistem pemilihan umum, dilihat dari kedudukan individu rakyat, maka terdapat sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis melihat bahwa rakyat terdiri atas individu-individu di mana hak suara berada pada masing-masing individu. Sedangkan pada sistem organisasi rakyat ditempatkan sebagai sejumlah kelompok individu atau dengan perkataan lain rakyat dibagi dalam organ-organ kelompok individu. Kelompok ini didasarkan

⁸⁷ Topo Santoso & Ida Budhiati, *"Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan"*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 257.

⁸⁸ Aisah Putri Budiarti, Firman Noor, dan Lili Romli, *"Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi dan Koalisi dalam pemilihan Presiden 2019"*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, 2018), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

misalnya geneologis, lapisan sosial, organisasi kelembagaan dan sebagainya. Dengan demikian pada sistem organis hak suara terletak pada kelompok.⁸⁹

Secara umum terdapat empat pembagian dalam sistem pemilu, yaitu Sistem Popularitas/mayoritas (*plurality/majority systems*), Sistem Perwakilan Proporsional (*proportional representation systems*), Sistem Campuran (*mixed systems*) dan sistem-sistem yang lain (*other systems*).⁹⁰

Di Indonesia, sistem pluraritas/mayoritas lebih dikenal dengan sistem distrik, kareta transfer perolehan suara ke dalam perolehan kursi lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan.

Pada Sistem Proporsional ini terdapat lagi dua sistem, yaitu yang pertama *List Proportional Representation* (List PR). Pada sistem ini, partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan. Para pemilih cukup memilih partai saja. Alokasi kursi dari partai-partai yang memperolehnya didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Yang kedua, *The Single Tranferable Vote* (STV). Didalam sistem ini para pemilih diberikan otoritas untuk preferensinya, dan pemenangnya didasarkan atas pemungutan kuota vote.

Kemudian daripada itu, sistem pemilihan mekanis dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara yaitu sistem perwakilan distrik/mayoritas/single member constituencies, dan sistem perwakilan proporsional.

⁸⁹ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum di Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia, 1981), h. 333-335.

⁹⁰ Kacung Marijan, *Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007), h. 22-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis. setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Jadi, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas.

Pada sistem distrik wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan/daerah/ daerah pemilihan/ cpnstituencies yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat. Tiap distrik diwakili oleh seorang wakil, karena itu dinamakan juga sistem mayoritas karena untuk menentukan wakil terpilih dari suatu distrik ditentukan menurut calon mana yang memperoleh suara terbanyak.

Menurut Sri Soemantri, sistem pemilihan umum distrik akan berlaku hal-hal seperti berikut:⁹¹

1. Wilayah Negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang hendak diperebutkan dalam Badan Perwakilan Rakyat.
2. Setiap distrik pemilihan hanya akan memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat.
3. Seorang calon terpilih, apabila dia dapat memperoleh suara terbanyak.
4. Pemilihan umum dilakukan sekali jalan.

⁹¹ <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 06.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Sisa suara yang diperoleh dalam distrik pemilihan yang satu tidak dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh dalam distrik pemilihan yang lain.

Sedangkan sistem proposional ialah sistem di mana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Sistem proporsional ini dapat dilakukan dengan bervariasi, misalnya dengan *hare system* dan *list system*.

Hare system, di mana pemilih diberikan kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya, dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbalan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya.

List system ialah dimana pemilih diminta untuk memilih di antara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Sistem pemilihan umum yang dipraktekkan di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, 1982, dan 1987 adalah memakai sistem perwakilan berimbang atau disebut juga sistem proporsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keikutsertaan Pejabat Negara dan Kepala Daerah sangat dimungkinkan karena telah terfasilitasi melalui peraturan-peraturan yang ada, baik pada tatanan Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang mana kedua aturan tersebut memberikan ruang yang cukup kepada Pejabat Negara dan Kepala Daerah untuk mengikuti alur Pemilihan Umum sebagai timsukses dengan ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi individu kepala daerah tersebut.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru, KPU dan Bawaslu Provinsi Riau terkesan sangat mengabaikan segala bentuk ketentuan yang harus di penuhi para Kepala Daerah yang ingin mengikuti kegiatan kampanye, terbukti dari kejadian dilapangan dengan tidak adanya konfirmasi 3 hari sebelum hari penyelenggaraan kegiatan kampanye terkait keikutsertaan Kepala Daerah dalam kegiatan kampanye tersebut, selanjutnya tidak telitinya dalam memastikan surat izin cuti kepala daerah yang diterbitkan oleh Plt. Gubernur 2 hari sebelum agenda kampanye yang seharusnya diterbitkan paling lambat 4 hari sebelum kepala daerah mengikuti agenda kampanye.

B. Saran

1. Untuk kedepannya, penulis berharap kepada pemangku kebijakan dalam hal membuat Undang-Undang tentang Pemilihan Umum kiranya dapat mengkaji kembali pasal-pasal mengenai keikutsertaan pejabat Negara, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota, guna menjaga netralitas dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan kampanye.
2. Kiranya agar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat lebih jujur, adil, teliti dan bertindak secara profesional, yakni menghindari yang namanya kompromi terhadap sebuah pelanggaran dan menindak tegas setiap peserta Pemilu maupun team yang terlibat, yang melakukan pelanggaran dalam Pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, edisi 1.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (20018). *Pengantar Merode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiarti, Aisah Putri., Firman Noor., dan Lili Romli. (2018). *Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi dan Koalisi dalam pemilihan Presiden 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik.
- Budirjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Harun, Refly. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Marijan, Kacung. (2007). *Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- MD, Moh. Mahfud. (2010). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenta, Andi Pangerang & Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakasa.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1981). *Pemilihan Umum di Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia.
- Prihatmoko, Joko. J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014.

Ridwan, HR. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruslan, Rosady. (2008). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem.

Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Setiawan, Dian Bakti. (2011). *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharizal & Muslim Chaniago. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Tjandra, W. Riawan. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tricahyono, Ibnu. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing.

Venus, Antar. (2009). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.



JURNAL

Aermadepa. (2014). *Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan*. *Jurtal Justitia*, 1 (2), 1-14

Isra, Saldi. (2009). *Pemilihan Presiden Lansung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial*. *Jurnal Konstitusi*, 2 (1): 108-109

Jurdi, Fajlurrahman. (2017). *Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial)*, *Amanna Gappa*, 25 (2), 38-59

Widodo, Heru. (2018). *The Institutional Renewal In Settlement Of Disputes Of Local Election Results*. *Jurnal Cita Hukum*, 6 (2), 277–292.

Simanjuntak, Josner. (2018). *Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia*. *Papua Law Journal*, 1 (1), 119–141.

Pradika, Fauzi Wahyu. (2020). *Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris, “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia”. DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6 (1), 73–91.

Marzuki, Suparman. *Sinergitas Kerja KPU dan Panwaslu*. Makalah pada lokakarya nasional yang dilaksanakan Panwaslu di Bali, 3 Februrari 2004

INTERNET

[https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-](https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%20adanya,kekuatan%20rezim%20penguasa%20sejak%201971.&text=Setelah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang)

[terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%](https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%20adanya,kekuatan%20rezim%20penguasa%20sejak%201971.&text=Setelah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang)

[20adanya,kekuatan%20rezim%20penguasa%20sejak%201971.&text=Sete](https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%20adanya,kekuatan%20rezim%20penguasa%20sejak%201971.&text=Setelah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang)

[lah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang](https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%20adanya,kekuatan%20rezim%20penguasa%20sejak%201971.&text=Setelah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

%20kelembagaan%20pengawas%20pemilu.

<https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>.

<https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum#Latar_belakang.

<https://kbbi.web.id/lembaga>.

<https://kbbi.web.id/kampanye>.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/185495-semilan-kepala-daerah-dan-Gubernur-Riau-dukung-jokowi-maruf>.

<https://news.okezone.com/read/2018/11/03/605/1972885/bawaslu-putusan-9-kepala-daerah-di-Riau-yang-deklarasi-dukung-jokowi-tak-bersalah>.

<http://pkn-ips.blogspot.com/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-Negara-di.html>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/12/28/07315851/mendagri-minta-Gubernur-Riau-tegur-10-kepala-daerah-yang-deklarasi-dukung>.

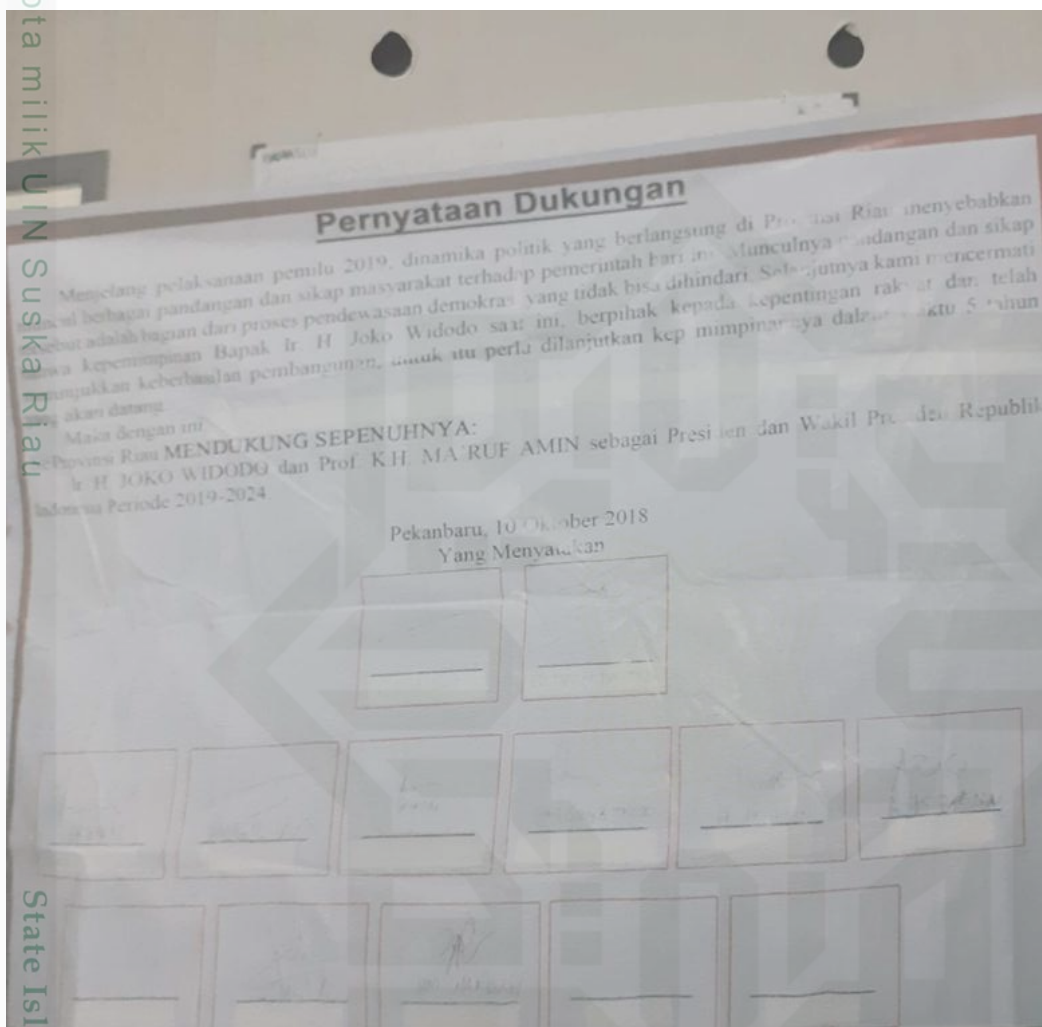
<https://www.ruangguru.co.id/pemilu-pengertian-fungsi-tujuan-asas-bentuk-dan-sistemnya-terlengkap/>.

<https://sinarlampung.co/2019/02/07/bupati-limapuluh-kota-diusir-bawaslu-saat-hadiri-tabligh-akbar-maruf-amin/>.

<http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>.

<https://slideplayer.info/slide/2338863/>.

Lampiran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

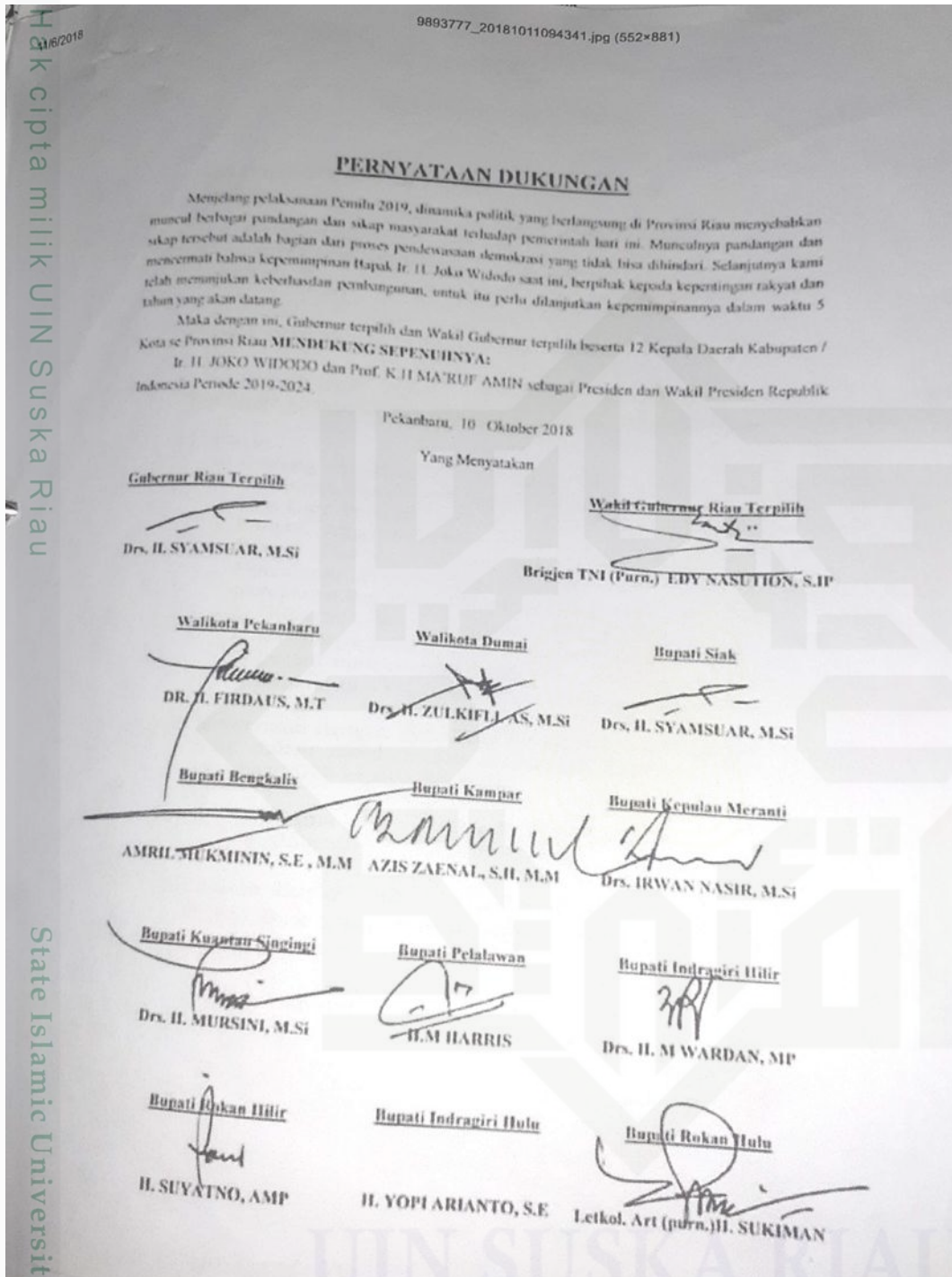
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



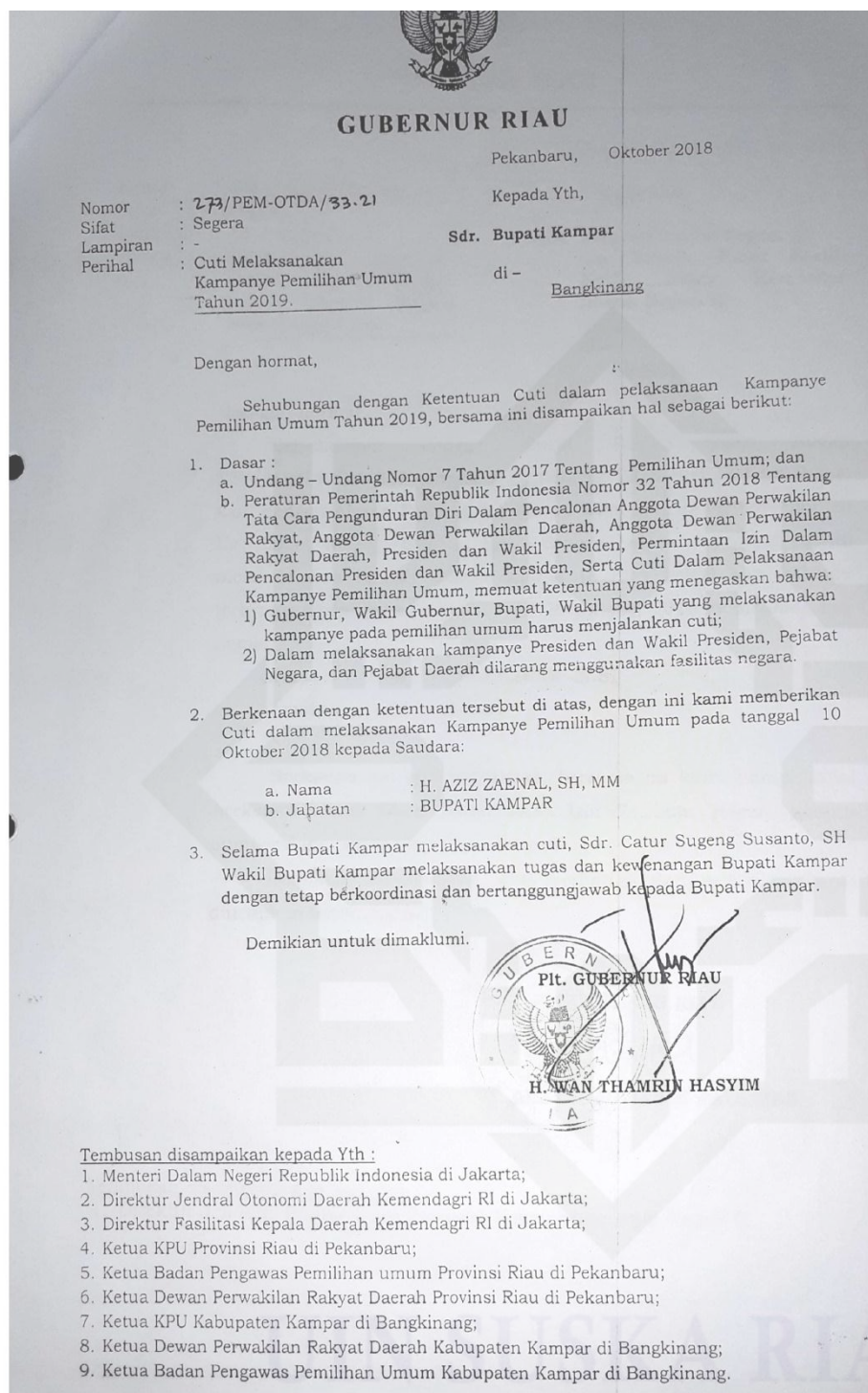


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

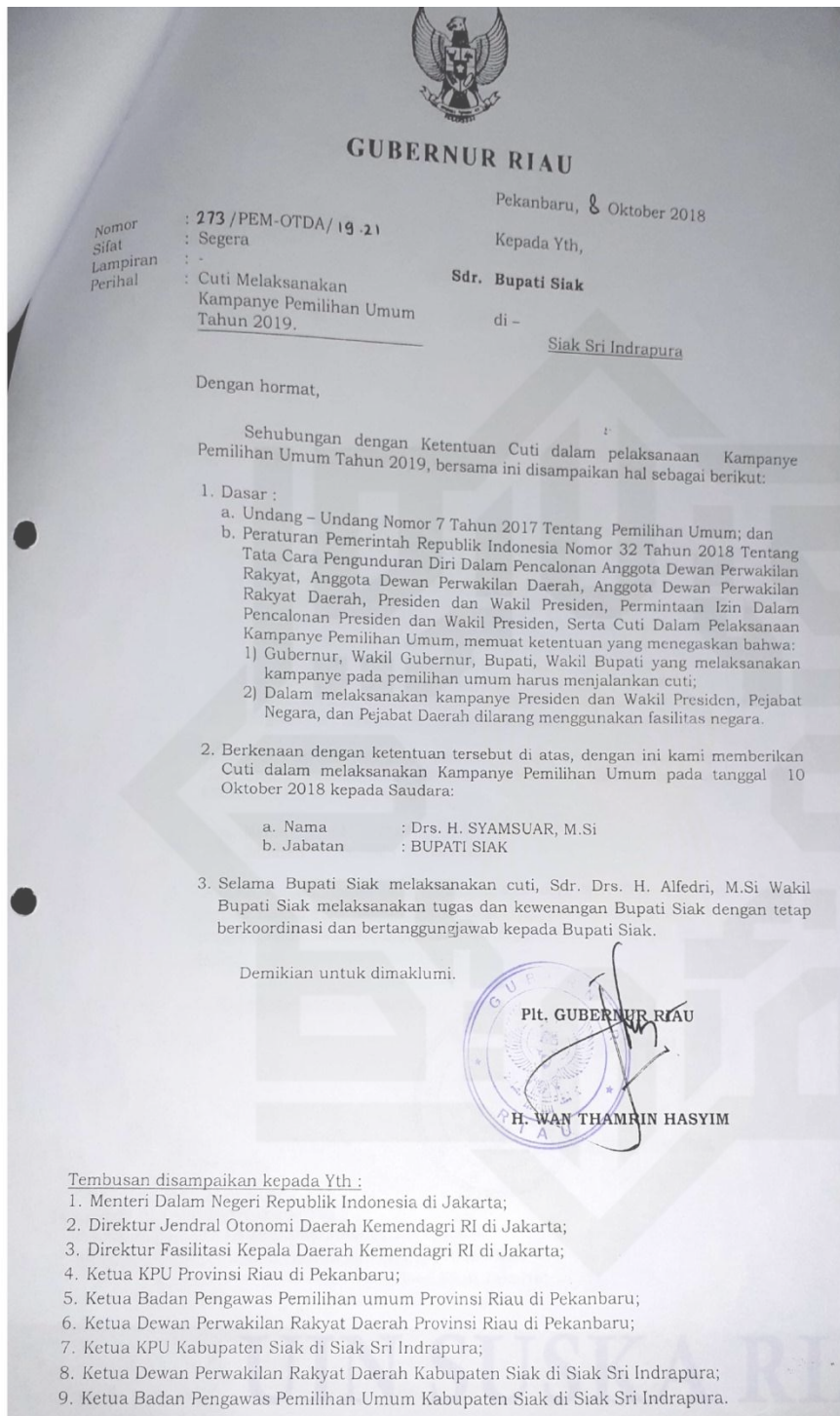


Scanned by CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GOVERNOR OF RIAU

GOVERNUR RIAU

Pekanbaru, 9 Oktober 2018

Kepada Yth,

Sdr. Bupati Kepulauan Meranti

di - Selatpanjang

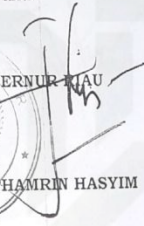
Nomor : 273/PEM-OTDA/ 32.21
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Ketentuan Cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar :
 - a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan yang menegaskan bahwa:
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati yang melaksanakan kampanye pada pemilihan umum harus menjalankan cuti;
 - 2) Dalam melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami memberikan Cuti dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 kepada Saudara:
 - a. Nama : Drs. H. IRWAN, M.Si
 - b. Jabatan : BUPATI KEPULAUAN MERANTI
3. Selama Bupati Kepulauan Meranti melaksanakan cuti, Sdr. Drs. H. Said Hasyim Wakil Bupati Kepulauan Meranti melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kepulauan Meranti dengan tetap berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.

Demikian untuk dimaklumi.



Pt. GUBERNUR RIAU

H. WAN THAMRIN HASYIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
3. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

DAFTAR DATA PRIMER		
NO	MASALAH	DATA PRIMER
1	Bagaimana keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Provinsi Riau?	Nurhuda Syah (Bawaslu) = Iya benar, tapi yang datang hanya 10 (hal. 77)
		Gema Wahyu Adinata (Bawaslu) = Jika dilihat dari sudut pandang sebagai masyarakat biasa, tentu jelas ini tidak baik untuk kontestasi. Tapi jika dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku, keterlibatnya kepala daerah di provinsi riau dalam kampanye ini tentu tidak sepenuhnya dilarang karena mereka memiliki hak, namun kepala daerah yang turut serta dalam kampanye harus mengikuti aturan yang sudah ada. (hal.77)
		Yelli Nofiza (KPU) = Sebelumnya kami tidak mengetahui. Kami dari KPU mengetahui kehadiran 10 kepala daerah ini dihari H acara. (hal. 82)
		Gema Wahyu Adinata (Bawaslu) = Untuk teknisnya ini ada di KPU. Bawaslu hanya memonitoring berjalannya kampanye atau deklarasi yang berjalan. (hal. 83)
		Yelli Nofiza (KPU) = Kita berbicara Out Of Record. Untuk kehadiran kepala daerah di dalam kampanye ini di dalam aturannya, kepala daerah yang hadir ini harus menyerahkan surat cuti sebelum 3 hari dari acara deklarasi. Tapi pada kenyataannya, saya baru dapat surat cuti ini di meja saya pada Pagi dihari acara deklarasi berjalan. Saya yang berwenang waktu itu berfikir positif, mungkin saja surat ini terlambat masuk ke ruangan saya karena tidak diterima langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		oleh saya. (hal. 83)
	Bagaimana tindakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terhadap keterlibatan kepala daerah di Provinsi Riau dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden?	<p>Yelli Nofiza (KPU) = Ada team kampanye ini yang taat dengan aturan dan ada juga yang bandel. Seperti pelaksanaan kampanye atau deklarasi sore hari, tapi team dari kampanye baru melaporkan ke KPU pagi hari. Regulasi kami hanya sebatas pengaturan jadwal kampanye dan mengingatkan apa yang seharusnya diselesaikan agar team kampanye tidak melanggar dan ditindak sanksi oleh bawaslu. (hal. 84)</p> <p>Nurhuda Syah (Bawaslu) = Awalnya kami beranggapan bahwa mereka melanggar hukum pidana pada undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Namun setelah melakukan penelusuran, ternyata tidak ada pelanggaran pidana yang awalnya kami duga. Dugaan untuk pidana ini gugur dikarenakan masing-masing kepala daerah ini mengantongi surat izin cuti. (hal. 84)</p>

DAFTAR DATA SEKUNDER

NO	MASALAH	DATA
	Bagaimana keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-	<p>Undang-Undang Dasar 1945 (h.1)</p> <p>Mahfud MD, <i>Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu</i>, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010). (hal. 1)</p> <p>Jimly Asshiddiqi, <i>Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia</i>, (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2010) (hal.1)</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Provinsi Riau ?	Ibnu Tricahyono, “ <i>Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal</i> ”. (hal. 2)
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (hal. 2, 3, 7, 8 dan 9)
BAB I	https://kbbi.web.id/kampanye . (hal. 3)
	Antar Venus, " <i>Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye Komunikasi</i> " (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009). (hal. 4 & 6)
	https://news.okezone.com/read/2018/11/03/605/1972885/bawaslu-putuskan-9-kepala-daerah-di-Riau-yang-deklarasi . (hal. 6)
	https://regional.kompas.com/read/2018/12/28/07315851/mendagri-minta-gubernur-Riau-tegur-10-kepala-daerah-yang-deklarasi-dukung , (hal. 7)
	https://mediaindonesia.com/read/detail/185495 – sembilan-kepala-daerah-dan-gubernur-Riau-dukung-jokowi-maruf (hal. 7)
	Sugiyono, “ <i>Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D</i> ”, (Bandung: Alfabeta, 2012). (hal. 11)
	Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, <i>Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat</i> , (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). (hal. 11)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Zainuddin Ali, <i>"Metodelogi Penelitian Hukum"</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). (hal. 12)
	Peter Mahmud Marzuki, <i>"Penelitian Hukum"</i> (Jakarta: Pranada Media Grup, 2010). (hal. 12)
	Amiruddin dan Zainal Asikin, <i>"Pengantar Merode Penelitian Hukum"</i> , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). (hal. 12)
	Bambang Sunggono, <i>"Metode Penelitian Hukum"</i> , (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). (hal. 12)
	Bambang Waluyo, <i>"Penelitian Hukum Dalam Praktek"</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). (hal. 12)
	Rianto Adi, <i>"Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum"</i> , (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004). (hal. 13)
	Zainudin Ali, <i>"Metodelogi Penelitian Hukum"</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). (hal. 13)
	Lexy J. Moleong, <i>"Metodologi Penelitian Kualitatif"</i> , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012). (hal. 13)
BAB II	Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014. (hal. 18)
	Miriam Budirjo. <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i> . (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008). (hal. 25)
	Prihatmoko, J. Joko, <i>Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi</i> , (Semarang: LP21, 2003). (hal. 26)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	https://www.ruangguru.co.id/pemilu-pengertian-fungsi-tujuan-asas-bentuk-dan-sistemnya-terlengkap. (hal. 26)
	https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum#Latar_belakang. (hal. 30)
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (hal. 31, 32, 41, dan 43)
	https://bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk#:~:text=Awal%20berdirinya%20Bawaslu%20dilatarbelakangi%20adanya,kekuatan%20rezim%20pengusa%20sejak%201971.&text=Setelah%20itu%2C%20melalui%20Undang%2DUndang,mendasar%20tentang%20kelembagaan%20pengawas%20pemilu. (hal. 36)
	Ramlan Surbakti, <i>Memahami Ilmu Politik</i> , (Jakarta: PT. Grasindo, 1992). (hal. 37)
	Morissan, <i>Hukum Tata Negara RI Era Reformasi</i> , (Jakarta: Ramdina Prakasa. 2005). (hal. 37)
BAB III	https://kbbi.web.id/lembaga. (hal. 45)
	https://slideplayer.info/slide/2338863. (hal. 45)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta, 2016. (hal. 46)
	Munir Fuady, <i>Teori Negara Hukum Modern</i> , (Bandung: Refika Aditama, 2009). (hal. 47)
	Jimly Asshiddiqie, <i>Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung</i> , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). (hal. 47)
	Fajlurrahman Jurdi, Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial), <i>Amanna Gappa</i> , 25(2), 38-59. (hal. 48)
	Miriam Budiardjo. <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i> . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). (hal. 49)
	http://pkn-ips.blogspot.com/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-Negara-di.html . (hal. 51)
	Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i> , (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005). (hal. 55)
	Sarundajang, <i>Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah</i> , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 2002). (hal. 56 & 60)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	HR. Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). (hal. 57)
	http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html . (hal. 57)
	Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, <i>Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah</i> , (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018). (hal. 57 & 58)
	Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i> , (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001). (hal. 58)
	Suharizal & Muslim Chaniago, <i>Hukum Pemerintah Daerah</i> , (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). (hal. 59 & 60)
	W. Riawan Tjandra, <i>Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa</i> , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009). (hal. 62)
	Ridwan HR. <i>Hukum Administrasi Negara</i> , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013). (hal. 65)
	Jimly Asshiddiqie, <i>Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia</i> , (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010). (hal. 66)
	Dian Bakti Setiawan, <i>Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia</i> , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). (hal. 67)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Saldi Isra, “Pemilihan Presiden Lansung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial”, <i>Jurnal Konstitusi</i> 2, No 1 (2009): 108-109 (hal. 70)
		Aisah Putri Budiarti, Firman Noor, dan Lili Romli, “ <i>Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi dan Koalisi dalam pemilihan Presiden 2019</i> ”. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, 2018). (hal. 72)
		Topo Santoso & Ida Budhiati, “ <i>Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan</i> ”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019). (hal. 72)
		Kacung Marijan, <i>Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian</i> , (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007). (hal. 73)
		Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, <i>Pemilihan Umum di Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978</i> , (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia, 1981). (hal. 73)
2	Bagaimana tindakan Komisi Pemilihan	Ruslan, <i>Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi</i> , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). (hal. 76)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Umum dan Badan Pengawas Pemilu terhadap keterlibatan kepala daerah di Provinsi Riau dalam kampanye pemilihan calon presiden dan wakil presiden?</p> <p>BAB IV</p>	<p>Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris, “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia”, <i>DIVERSI : Jurnal Hukum</i> 6, no. 1 (2020). (hal. 81)</p>
	<p>Fajlurrahman Jurdi, “<i>Pengantar Hukum Pemilihan Umum</i>”, Jakarta: Kencana, 2018. (hal. 84)</p>
	<p>Topo Santoso, dkk, <i>Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014</i>, (Jakarta : Perludem, 2006). (hal. 86)</p>
	<p>https://sinarlampung.co/2019/02/07/bupati-limapuluh-kota-diusir-bawaslu-saat-hadiri-tabligh-akbar-maruf-amin/. (hal. 87)</p> <p>Suparman Marzuki, “Sinergitas Kerja KPU dan Panwaslu”, <i>Makalah</i> pada lokakarya nasional yang dilaksanakan Panwaslu di Bali, 3 Februrari 2004. (hal. 88)</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. (hal. 88)</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Josner Simanjuntak, “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia”, <i>Papua Law Journal</i> 1, no. 1 (2018). (hal. 89)
	Heru Widodo, “The Institutional Renewal In Settlement Of Disputes Of Local Election Results”, <i>Jurnal Cita Hukum</i> 6, no. 2 (2018). (hal. 89)
	Refly Harun, Pemilu Konstitusional: <i>Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan</i> , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016). (hal. 90)
	Aermadepa, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan”, <i>Jurtal Justitia</i> 1, no 2 (2019). (hal. 90)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU”* yang ditulis oleh :

Nama : **RAMADHAN FEBRIAN**
 NIM : 11527103033
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Desi Devika Devra, M. Si

Penguji I
Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Penguji II
Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalimus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8756/2019
Sifat : Biasa
Temp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 30 Oktober 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAMADHAN FEBRIAN
NIM : 11527103033
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kota Pekanbaru, KPU Provinsi
Riau, KPU Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Keterlibatan Kepala Daerah Di Provinsi Riau Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden
Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar.. M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27483
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8756/2019 Tanggal 30 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RAMADHAN FEBRIAN**
2. NIM / KTP : **11527103033**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI RIAU DALAM KAMPANYE PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
7. Lokasi Penelitian :
 1. BAWASLU PROVINSI RIAU
 2. KPU PROVINSI RIAU
 3. BAWASLU KOTA PEKANBARU
 4. KPU KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Bawaslu provinsi riau
3. Ketua KPU Provinsi Riau
4. Walikota Pekanbaru
5. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
7. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3712



232018

a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/27483 tanggal 5 Desember 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **RAMADHAN FEBRIAN**
2. NIM : 11527103033
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : KAPALO BUKIK DESA BATU PAYUANG KEC. LAREH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA-SUMATERA BARAT
7. Judul Penelitian : **KETERLIBATAN KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU DALAM KAMPANYE PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
8. Lokasi Penelitian : 1. KOMISI PEMELIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
2. BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
Pembina
NIP. 19690701 198909 1 001

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 001 /RI/Set/HM.02.04/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Anderson, S.Pi., M.Si
jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

dengan ini menerangkan bahwa

nama : Ramadhan Febrian
NPM : 11527103033
program studi : Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul skripsi : ***"Keterlibatan kepala daerah di Provinsi Riau dalam Kampanye Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"***. Pada Tanggal 7 Januari 2020 dengan nomor permohonan 001/RI/PPID/I/2020.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Januari 2020



Kepala Sekretariat,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Anderson



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Jalan Arifin Ahmad No. 39 Telp. (0761) 8415550, 8415551, Fax. (0761) 8415550, 8415551

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Nomor : 07/03-Kt/1471/KPU-Kot/I/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**
Kepada YTh : **Kepala Badan Keshangpol Kota Pekanbaru**
di -
Pekanbaru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Kesbangpol Nomor : 071/BKBP-Rekom/2019/3712 tanggal 23 Desember 2019 perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menyetujui Izin Penelitian dimaksud dengan catatan data dan informasi yang diberikan hanya digunakan untuk penyelesaian skripsi atas nama :

Nama : **RAMADHAN FEBRIAN**
NIM : 11527103033
Judul Skripsi : Keterlibatan Kepala Daerah Provinsi Riau dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Kota Pekanbaru,

Ketua



ANTON MERCIYANTO

Tembusan :
1. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAMADHAN FEBRIAN
NIM : 11527103033
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU

Pembimbing: Nur Hidayat, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ramadhan Febrian adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1995. Penulis merupakan anak Sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Yoserizal, S.H. dan Ibu Eliya Roza. Penulis beragama Islam dan Berkebangsaan Indonesia. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 01 Suliki (*lulus tahun 2007*), melanjutkan ke SMPN 01 Suliki (*lulus tahun 2010*) dan SMKN 1 Guguk dengan jurusan Multimedia (*lulus tahun 2013*). Pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN, penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.

Selama berkuliah, Penulis aktif didalam organisasi seni dan Penulis juga pernah menjadi ketua Organisasi Seni (UKM) Sanggar Kasimiyah periode 2016-2017 dan periode 2017-2018. Pada bulan Maret 2018 penulis selesai melakukan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada bulan September tahun 2018 penulis selesai melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di dewa Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

Pada tanggal 14 Juli 2021 penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana dengan judul Skripsi “**Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau**” dibawah bimbingan Bapak Nur Hidayat, S.H., M.H dengan Predikat Sangat Memuaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.